

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI RIAU
TAHUN 2018-2023**

Oleh: Ekky Hardiyanto

Dosen Pembimbing: Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research was motivated by the simultaneous election of regional heads of Riau Province for the third wave. In this election, the Central KPU targets Riau people's participation to reach 70%. However, in its implementation, it was only able to get 54% of the total votes from the 363,530 DPT in Bengkalis Regency. This makes Bengkalis Regency only ranked 10th out of 12 regencies / cities in Riau Province. This of course is not good news for the democratic system in Indonesia. This study aims to determine the strategy of the Bengkalis KPU in increasing the participation of strategic theory, political participation theory, political socialization theory. The writing method used in this thesis is qualitative. The types of data in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative.

The results of this study indicate that the KPU's strategy is to increase public participation through: (1) Strengthening Strategies, efforts are made to increase the capacity and quality of the organizers of the election for Governors and Deputy Governors through technical guidance and improve communication and information disclosure through information boards, mass media, through mosque and smart home stakeholders. (2) Rationalization Strategy, the effort made is by socializing face to face communication such as going to campus, schools, ramadhan safaris and socializing various media such as Facebook, WhatsApp, KPU website of Bengkalis Regency, television, radio, newspapers, banners, billboards, leaflets and media props. (3) Persuasion strategies, conducting leisurely walks, roadshows, establishing stands at beach party festivals, and conducting interactive dialogues on radio and television, of course with the assistance of the Riau Provincial KPU. (4) Confrontation strategy, in the form of socialization of how to vote and the disadvantages of not voting, the KPU invites the public to vote through a sermon in a mosque with the theme of choosing a leader. The supporting factors for the implementation of the Bengkalis KPU strategy are the availability of adequate human resources, professionalism, support from the government and stakeholders. Meanwhile, the inhibiting factors were limited funds, number of personnel, area, and lack of public response in socialization. The author concludes that the Bengkalis KPU has implemented these four strategies with the existing supporting factors. However, there are also several inhibiting factors that make this strategy less than optimal.

PENDAHULUAN

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada pasal 11 Ayat (3) menjelaskan tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur bahwa: menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU .

Pemilihan umum tidak hanya terdapat pada tingkat nasional yang fungsinya untuk memilih Presiden, akan tetapi pada tingkat daerah, Pemilu juga dilaksanakan untuk memilih Kepala Daerah atau disebut Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sebagai konsekuensi terbentuknya UU Otonomi Daerah, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur, Wali Kota, dan Bupati secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah.

Dengan itu, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi (otonom), seperti mereka memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil-wakilnya di lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, Dewan Perwakilan Daerah/DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DRPD). Pemilihan kepala daerah yang menjadikan masyarakat sebagai pemilihnya dilaksanakan pertama kali pada tahun 2005 yang sebelumnya Kepala Dearah dipilih oleh Legislatif. Pilkada telah dilaksanakan sebanyak 3 kali, pada 2004, 2008 dan 2013. Dari deretan Pemilihan kepala daerah tersebut banyak permasalahan yang ditemukan, salah satunya adalah tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam

berpartisipasi memberikan suaranya dalam pemilihan gubernur.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dan perilaku golput (tidak memilih) pada kinerja penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU dapat dilihat dari aspek yaitu, Aspek sosialisasi pemilihan. Pada aspek ini KPU dituntut untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang cenderung monoton, KPU diharapkan dapat melakukan modifikasi kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Semakin intens dan kreatifnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU untuk menjangkau segmentasi pemilih maka pesan pesan sosialisasi dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya sosialisasi diharapkan semakin menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan sehingga sikap golputmasyarakat pada pelaksanaan pemilihan dapat berkurang.

Hal-hal yang menjadi alasan bagi KPU untuk menyusun strategi mengurangi angka golput yaitu : Pertama, rendahnya tingkat partisipasi pemilih akan mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemilihan yang berdampak pada kinerja penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU. Kedua, golput akan menguntungkan calon yang belum tentu berkualitas atau disukai. Artinya, calon bisa menang hanya dengan perolehan suara rendah atau hanya mempunyai basis massa sedikit karena lebih banyak masyarakat yang golput, Ini mengakibatkan legitimasi kekuasaan calon terpilih akan berkurang. Ketiga, pilihan untuk tidak memilih (golput) merupakan bentuk pemborosan terhadap Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD), karena tidak digunakannya surat suara yang telah dicetak berdasarkan jumlah mata pilih yang ada. Berdasarkan

fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti yang berjudul **“STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2018-2023”**

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, mengenai bagaimana strategi KPU Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 - 2023. Penggunaan penelitian kualitatif dipandang jauh lebih subyektif karena menggunakan metode yang berbeda dari mengumpulkan informasi, individu dalam menggunakan wawancara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis. Penentuan lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, berdasarkan latar belakang masalah, KPU Kabupaten Bengkalis gagal mengurangi angka Golput pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 - 2023. Kedua, pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penelitian. Ketiga, faktor kemudahan dalam memperoleh sumber data dalam penelitian.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 : 97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Teknik Pengumpulan data:

1. Wawancara Mendalam (Deep Interview)

Teknik wawancara yang diarahkan pada suatu masalah tertentu atau yang menjadi pusat penelitian. Ini merupakan sebuah proses untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan informan yang dianggap memiliki representasi informasi yang relevan dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat atau agenda-agenda. Data-data tersebut diharapkan mampu memperkaya teori, pendapat serta pemikiran terkait dengan strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Bengkalis dalam mengurangi angka golput.

Teknik Analisis data Drury dalam Moleong (2006: 248) menyatakan bahwa tahap analisis data kualitatif melalui proses yaitu pertama mencatat hasil catatan lapangan, kedua mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat iktisar dan membuat indeks, dan ketiga mencari makna data, menemukan pola dan hubungan anatar data serta membuat temuan-temuan umum.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 lebih tinggi dibanding pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya yaitu Tahun 2013. Namun meskipun meningkat dari pemilihan sebelumnya, tetap saja persentase partisipasi pemilih di Kabupaten Bengkalis tidak mencapai target seperti yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat sebagai daerah yang ditunjuk sebagai

Pilkada Pilot Project Nasional pada Pemilihan Gubernur Provinsi Riau tahun 2018. Meskipun demikian sebenarnya KPU Bengkalis telah melakukan berbagai cara atau strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, namun tidak tercapainya target partisipasi pemilih bukan tanggung jawab KPU Bengkalis semata. Namun merupakan tanggung jawab bersama, antara KPU, Pemerintah, masyarakat dan peserta itu sendiri.

3.1 Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018

3.1.1 Strategi Penguatan

3.1.1.1 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Penyelenggara Pemilu

Meningkatkan kapasitas dan kualitas (Capacity Building) penyelenggara pemilu di tingkat PPK, PPS dan KPPS maupun PPDP merupakan salah satu strategi penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis. Bentuk peningkatan yang dilakukan adalah Bimbingan Teknis (BIMTEK), FGD, rapat kerja, sharing informasi melalui Whatsapp Group dan dalam bentuk penyuluhan.

3.1.1.2 Memperkuat Komunikasi dan Keterbukaan Informasi.

Memperkuat komunikasi dan keterbukaan Informasi KPU Bengkalis kepada public merupakan salah satu strategi KPU Bengkalis dalam penguatan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan public atau masyarakat, sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat baik mengenai teknis penyelenggaraan maupun data-data lain dapat mudah baik mengenai teknis penyelenggaraan maupun data-data lain dapat mudah

diakses oleh masyarakat, diharapkan outputnya dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun 2018.

3.1.2 Strategi Rasionalisasi

3.1.2.1 Sosialisasi Komunikasi Tatap Muka (Face To Face)

Sosialisasi merupakan suatu proses dimana seseorang berpartisipasi dalam masyarakat guna memberi atau mendapatkan informasi yang terjadi melalui interaksi sosial secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan sosialisasi tatap muka (face to face) pada masyarakat merupakan salah satu kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bengkalis dalam menyampaikan informasi seputar pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.

3.1.2.2. Sosialisasi Komunikasi Melalui Media

Adanya penggunaan berbagai media komunikasi yang digunakan KPU Kabupaten Bengkalis dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 merupakan hal yang penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih, penggunaan media seperti surat koran, radio, dan internet sangat diperlukan untuk menjelaskan serta memberikan informasi kepada masyarakat yang tersebar tanpa harus ketemu secara langsung dimanapun mereka berada.

3.1.3 Strategi Bujukan

3.1.3.1 Melakukan Pendekatan Kepada Masyarakat Melalui Berbagai Kegiatan

Strategi ini dilakukan agar masyarakat dapat tertarik dengan kegiatan yang dibuat oleh KPU Bengkalis. Kegiatan yang dimaksud

adalah seperti kegiatan gerak jalan santai, sepeda gowes, kegiatan lainnya yang mempunyai daya Tarik untuk mengajak masyarakat agar mengikutsertakan dirinya dalam kegiatan tersebut.

3.1.3.2 Melakukan Dialog Pemilihan Gubernur Riau Kepada Masyarakat.

Melakukan dialog pemilihan Gubernur Riau secara langsung kepada masyarakat merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh KPU Bengkalis, strategi ini bisa dilaksanakan melalui media atau bertemu langsung dengan masyarakat sebagai pemilih. Untuk bertemu langsung sama halnya dengan *strategi face to face* (tatap muka), Cuma disini disertai dengan tanya jawab antara KPU Bengkalis dengan masyarakat secara langsung di tempat-tempat tertentu.

3.1.4 Strategi Konfrontasi

3.1.4.1 Sosialisai Cara Memilih

Sosialisasi cara memilih merupakan pemberian contoh-contoh kepada masyarakat tentang tata cara memilih yang baik dan benar. Cara memilih ini umumnya dilakukan melalui media massa baik itu cetak maupun media elektronik. Dalam hal ini KPU Bengkalis menggunakan kedua media tersebut agar seluruh masyarakat bisa mengerti secara cepat petunjuk-petunjuk yang telah diberikan secara detail itu berupa gambar maupun film pendek atau video.

3.1.4.2 Sosialisasi Kerugian Jika Tidak Memilih

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan system politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sedangkan menurut syarial

dalam sosialisasi politik ialah pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

3.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018

3.2.1 Faktor Pendukung

3.2.1.1 Ketersediaan SDM Yang Berpengalaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Riau.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam upaya meningkatkan sumber daya penyelenggara Pemilihan Gubernur Riau tahun 2018 yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada tenaga atau personil KPU Bengkalis serta seluruh panitia adhoc, kegiatan tersebut berupa pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada seluruh panitia pelaksana Pemilihan Gubernur Riau 2018 dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggara Pemilihan Gubernur Riau 2018 untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan kegiatan dan tahapan yang telah dan akan dikerjakan, intruksi kepada pegawai KPU Bengkalis dan panitia adhoc agar memanfaatkan segala momen yang melibatkan orang banyak untuk dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi, himbuan untuk mensosialisasikan lagi kegiatan Pemilihan Gubernur Riau di lingkungan kerjanya masing-masing, serta menekankan tentang pentingnya panitia

ad hoc berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi.

3.2.1.2 Profesionalisme Penyelenggara Dari Tingkat KPU Dan Sekretariat Sampai Panitia Adhoc Pemilihan Gubernur Riau

Profesionalisme adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang dalam hal ini adalah seluruh penyelenggara Pemilihan Gubernur Riau tahun 2018 baik KPU Bengkalis sampai ke tingkat ad hoc. Profesionalisme ini sangat penting untuk dilakukan untuk menghindari segala bentuk kecurangan yang ada. Sehingga tercipta pemilihan Gubernur Riau yang jujur, bersih dan adil dapat terselenggara secara baik tanpa adanya kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan wewenang dari setiap penyelenggara Pemilihan Gubernur Riau khususnya di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018.

3.2.1.4 Adanya Dukungan Dari Stakeholder di Kabupaten Bengkalis.

Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini adalah hubungan KPU Bengkalis dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dukungan dari stakeholder sangat penting untuk diperoleh agar suksesnya suatu kegiatan yang dilakukan mengingat peran penting stakeholder dianggap sangat penting dan mempunyai pengaruh yang cukup besar.

3.2.2 Faktor Penghambat

3.2.2.1 Keterbatasan Dana

Tahapan ini merupakan bagian yang sangat penting karena dari tahapan inilah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dapat merumuskan tindakan yang akan dilakukan serta pola-pola apa saja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. KPU Bengkalis dalam tahapan ini mendapatkan kendala seperti anggaran sosialisasi yang disediakan oleh pemerintah masih belum seimbang dengan jumlah penduduk serta luas wilayah Kabupaten Bengkalis sehingga pada tahapan formulasi program sosialisasi KPU Bengkalis belum mengcover secara keseluruhan tindakan yang akan dilaksanakan dalam sosialisasi Pemilihan Gubernur Riau, tetapi KPU Bengkalis dalam hal ini hanya memilih beberapa alternatif tindakan yang dianggap paling penting.

3.2.2.2 Keterbatasan Jumlah Tenaga Atau Personil

Sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, jika sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh. KPU Kabupaten Bengkalis dalam hal pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Gubernur Riau tahun 2018 menemukan kendala yang menjadi penghambat terlaksananya sosialisasi yaitu karena luasnya wilayah Kabupaten Bengkalis serta jumlah penduduk yang begitu besar sedangkan jumlah personil KPU Bengkalis yang terbatas sehingga menyebabkan dalam sosialisasi KPU Bengkalis belum dapat menjangkau keseluruhan masyarakat yang berada di

beberapa daerah di Kabupaten Bengkalis.

3.2.2.3 Cakupan Wilayah Yang Cukup Luas

Luasnya wilayah yang ada di Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu kendala bagi KPU Bengkalis dalam melakukan sosialisasi ke sejumlah daerah. Apalagi dengan luas wilayah yang juga tersebar di pulau-pulau kecil di Kabupaten Bengkalis juga diikuti dengan jumlah pemilih yang juga sangat banyak. Tentu hal ini akan memberikan pengaruh terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Bengkalis.

3.2.2.5 Kurangnya Respon Masyarakat Dalam Sosialisasi

Ilmuan politik mengidentifikasi beberapa kecenderungan perilaku politik masyarakat. Orang-orang yang tidak ikut dalam politik mendapat beberapa julukan seperti *apatistis*, *sinisme*, *alienasi*, dan *anomie*.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan strategi yang digunakan oleh KPU Bengkalis dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta faktor pendukung dan penghambat dari strategi yang digunakan oleh KPU Bengkalis pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, antara lain yaitu :

1. Strategi Penguatan yaitu salah satu cara atau metode yang dilakukan KPU Bengkalis untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Strategi ini dalam penerapannya dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara dalam hal ini adalah PPK, PPS, KPPS, dan PPDP serta petugas yang lainnya dengan melakukan Bimbingan Teknis,

Rapat Kerja, Koordinasi dan Monitoring. Kemudian untuk meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi KPU kepada Publik KPU Bengkalis dalam hal ini melalui media elektronik, media cetak, dan internet.

2. Strategi Rasionalisasi yang dilakukan KPU Bengkalis pertama, Sosialisasi tatap muka. Strategi ini dilakukan secara langsung kepada masyarakat dengan turun langsung kepada masyarakat dengan turun ke beberapa tempat seperti pasar, sekolah, mesjid, lapas, kampus dan tempat umum lainnya. Kedua, sosialisasi komunikasi melalui media. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan media massa baik itu media elektronik berupa televisi dan radio, media cetak berupa brosur, pamflet, poster, spanduk, baliho, stiker dan imsakiyah ramadhan, kemudian media internet melalui media sosial seperti facebook, whatsapp, instagram dan website KPU Bengkalis.

3. Strategi Bujukan yang dilakukan KPU Bengkalis dalam hal ini melakukan kegiatan seperti gerak jalan santai, pentas seni, roadshow, menggunakan alat musik khas dan lainnya. Kedua, melakukan dialog Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 kepada masyarakat.

4. Strategi konfrontasi yang dilakukan KPU Bengkalis melalui dua cara. yaitu dengan dengan membuat film pendek atau video dan melalui gambar dengan memanfaatkan media massa. Kedua, KPU Bengkalis melakukan strategi Konfrontasi kerugian jika tidak memilih.

- 1) Faktor pendukung terlaksananya strategi KPU Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan partisipasi pemilih Pertama, ketersediaan SDM yang berpengalaman dalam penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Kedua, Profesionalisme penyelenggara dari tingkat KPU dan sekretariat sampai panitia adhoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Ketiga, adanya dukungan dari pemerintah daerah daerah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh KPU Bengkalis. Keempat, adanya dukungan dari stakeholder yang berada di Kabupaten Bengkalis.

2) Faktor penghambat tidak maksimalnya strategi KPU Bengkalis dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Pertama, keterbatasan dana. Kedua, keterbatasan jumlah tenaga atau personil. Ketiga, keterbatasan waktu penyiapan pelaksanaan. Keempat, cakupan wilayah yang cukup luas. Kelima, kurangnya respon masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006 *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Budiardho. 2012. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana.
- Damsar, 2012. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana.
- Efriza. 2012. *Political Explore* (Sebuah Kajian Ilmu Politik). Bandung: Alfabeta.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kamarul Zaman, Rambe. 2016. *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose.

Kurniawan, Agung. 2005. *Strategi Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembahasan.

P. Huntington, Samuel-Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pito dkk, Andrianus. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik, Bandung: Nuansa*

Sitepu, P. Anthonius 2012. *Teori-Teori Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suko, Susilo. 2003. *Sosiologi Politik*, Surabaya: Yayasan Kampusina.

Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo.

Jurnal dan Skripsi:

Haris, Munawir, 2012. *Potret Partisipasi Politik NU di Indonesia dalam Lintasan Sejarah*, Sorong: Jurnal Review Politik Volume 02, Nomor 02 Sekolah Islam Negeri

Muslimah, Siti, 2016. *Evaluasi Strategi Penyelenggara Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Way Kanan)*, Bandar Lampung: FISIP Universitas Lampung.

Andila, Ryan Yudi. 2015. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput (Studi Pemilihan Walikota Dan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015)*, Bandar Lampung: FISIP Universitas Lampung.

Bilhaqi Amjada A'raaf.2019. *Stratgei Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa di Kota Pekanbaru pada Pemilihan Gubernur Riau*

2018. Pekanbaru. FISIP
Universitas Negeri Riau.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Pasal 3

Internet:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/05/24/kpu-bengkalis-klaim-partisipasi-pemilih-meningkat#sthash.QOALIB18.dpbs>

lainnya:

laporan KPU Kabupaten Bengkalis pada
pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018